

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**



Oleh :

**INTAN DWI PUTRI
07011381621138**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**INTAN DWI PUTRI
07011381621138**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 27 Agustus 2021

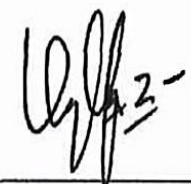
Pembimbing I

**Dr. M Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196406061992031001**



Pembimbing II

**Dr. Nengyanti, M.Hum.
NIP. 196704121992032002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 27 Agustus 2021.

Palembang, 21 Agustus 2021

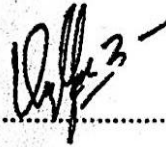
Ketua

1. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

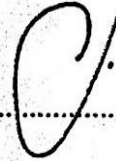

.....

Anggota

2. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 1967041121992032002


.....

3. Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003


.....

4. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001


.....

Mengetahui,
Dekan FISIP


Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Dwi Putri

NIM : 07011381621138

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 22 Juli 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 06 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Intan Dwi Putri

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kejujuran adalah Kebijakan terbaik. (Benjamin Franklin)

Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup.

(Najwa Shihab)

**Ucap syukur kepada mu Allah SWT Skripsi ini
saya persembahkan :**

Sebagai ungkapan cinta dan rasa terima kasihku yang tulus, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mengiringi langkahku dengan segala restu, dukungan dan doa serta saudara kandungku yang juga selalu membantu dan memberikan dukungan moril yang tiada hentinya.

ABSTRACT

Evaluation Of Community Development Policy and Community Empowerment In Mineral and Coal Mining Business Activities In Muara Enim Regency

This study aims to determine the evaluation of Muara Enimlocal government policies on community development and empowerment programs by mineral and coal mining companies in Muara Enim Regency using the Stufflebeam evaluation model, namely evaluation of context, input, process, and product. This research is a qualitative descriptive study with the PPM program as the object of research from a mineral and coal company in Muara Enim Regency and from the data from the ESDM Departement of South Sumatera. Data collection methods used are documentation studies and supported by interviews. Mineral and coal mining in Muara Enim Regency has not run optimally. Judging from the four dimensions of the evaluation, the First is an evaluation of the context that there are still companies in the mining business in Muara Enim Regency that do nit meet the PPM Program standards, the Second is an evaluation of the input that human resources have been fulfilled but the environmental rehabilitation of the mining area is not yet available and the facilities and infrastructure are limited to implement the PPM program, Third process evaluation that efforts to implement the PPM program are still carried out by the company with supervision from the government, Fourth product evaluation that there is no main reference or blueprint related to the PPM program so that in the preparation of the company there is no clear reference to the program.

Keywords:

Advisor I



Dr. M Husni Thamrin, M.Si.

NIP. 196406061992031001

Advisor II



Dr. Nengyanti, M.Hum.

NIP. 196704121992032002

Palembang, 27 August 2021

Chairman Of The State Administration Science Department

Faculty Of Social Science And Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN MUARA ENIM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pemerintah daerah Muara Enim terhadap program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Muara Enim menggunakan model evaluasi program Stufflebeam yaitu evaluasi *context, input, process, dan product*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah program PPM dari perusahaan minerba di Kabupaten Muara Enim dan dari data Dinas ESDM Sumatera Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi serta didukung dengan wawancara. Pada penelitian ini menghasilkan evaluasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Muara Enim belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari empat dimensi evaluasi, Pertama evaluasi *context* bahwa usaha pertambangan di Kabupaten Muara Enim masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi standar program PPM, Kedua evaluasi *input* bahwa SDM telah terpenuhi namun rehabilitasi lingkungan area tambang belum tersedia serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan program PPM, Ketiga evaluasi *process* bahwa upaya pelaksanaan program PPM tetap dilakukan oleh perusahaan dengan pengawasan dari pemerintah, Keempat evaluasi *product* bahwa tidak terdapat acuan utama atau cetak biru terkait program PPM sehingga dalam penyusunan perusahaan tidak memiliki acuan yang jelas.

Kata kunci :

Pembimbing I



Dr. M Husni Thamrin, M.Si.

NIP. 196406061992031001

Pembimbing II



Dr. Nengvanti, M.Hum.

NIP. 196704121992032002

Palembang, 27 Agustus 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Muara Enim ”.

Peneliti menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya pihak-pihak pendukung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan restu, doa, semangat serta dukungan yang tiada hentinya.
2. Saudara kandung penulis yang juga memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Pembimbing Akademik
5. Ibu Ermanvida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik
6. Bapak Dr. M Husni Thamrin., M.Si selaku Pembimbing Skripsi I dan bu Dra. Nengyanti, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi II
7. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
8. Seluruh staf dan admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik
9. Bapak Brilliant Faisal, S.Pi., M.Si selaku Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
10. Bapak Dr. Ir.Aries Syafrizal.,M.Si selaku Kepala Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
11. Seluruh staf dibagian Keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
12. Sahabat Sahabat Tanjung Enim dan teman satu angkatan Ilmu Administrasi Publik 2016 Kampus Palembang

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus menambah wawasan kepada para pembaca mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Kabupaten Muara Enim. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

a

Palembang, Agustus 2021

Intan Dwi Putri
NIM. 07011381621138

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II	18
A. Landasan Teori	18
2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.2 Evaluasi Kebijakan.....	20
2.3 Model Evaluasi Kebijakan	22
1. Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	25
B. Teori yang Digunakan	27
C. Penelitian Terdahulu	31
D. Kerangka Pemikiran	33
BAB III	37
A. Desain Penelitian	37
B. Definisi Konsep	37

C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	40
1. Jenis Data	40
2. Sumber Data.....	40
E. Key Informant	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Validitas Data	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
1. Reduksi Data	43
2. Penyajian Data.....	43
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	44
BAB IV	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Visi dan Misi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan	45
2. Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan .	47
B. Hasil dan Pembahasan.....	55
1. Evaluasi <i>Context</i>	56
2. Evaluasi <i>Input</i>	60
3. Evaluasi <i>Process</i>	66
4. Evaluasi <i>Product</i>	73
BAB V.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim	5
2. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	5
3. Intisari Model CIPP	23
4. Intisari Model William Dunn	24
5. Penelitian Terdahulu	31
6. Fokus Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Mekanisme Penyusunan Blue Print PPM oleh Dinas ESDM Sumsel.....	26
2. Kerangka Pemikiran	35
3. Struktur Organisasi Dinas ESDM Sumsel.....	54
4. Sosialisasi Kepada Badan Usaha Pertambangan di Aula Dinas ESDM	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Catatan Harian Penelitian	83
2. Perubahan undangan rangka penyusunan cetak biru	84
3. Surat penyampaian program pemberdayaan masyarakat tahun 2019.....	85

DAFTAR SINGKATAN

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
PPM	: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
RKAB	: Rencana Kerja Anggaran Biaya
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang berkontribusi dalam perkembangan perekonomian negara adalah industri pertambangan. Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam menunjang hajat hidup masyarakat, yang mana pemanfaatan terhadap potensi alam yang dimiliki Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh profit ekonomi, terlepas dari keuntungan yang diperoleh, tentu terdapat kontroversi terhadap dampak yang diperoleh masyarakat dalam wilayah pertambangan perlu menjadi perhatian tersendiri.

Pembangunan suatu usaha atau pembangunan sektor industri pada area kediaman masyarakat dibutuhkan adanya sinergi antara masyarakat dan perusahaan pemilik usaha tersebut agar terhindar dari konflik-konflik tertentu. Konsep saling menguntungkan ini dikenal dengan *community development* atau konsep berbasis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dan meminimalisir konflik antar kedua pihak (Watni, Suradji, Sutriya, & eds, 2007:8).

Konsep *community development* melahirkan kesadaran kolektif pada industri pertambangan, adanya dukungan dari stakeholder dan masyarakat dapat memberikan sumbangsih pertumbuhan usaha yang signifikan. Keith Davis menjelaskan “*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*”, akibatnya pengusaha pada saat menjalankan usahanya harus menjalankan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan keinginan masyarakat agar kekuasaannya tetap terjaga (Singih & ed, 2011:3).

Ada 5 program utama yang harus dirumuskan oleh pihak perusahaan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Utama, yaitu program bidang Pendidikan meliputi

beasiswa, Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar, bantuan tenaga pendidik, bantuan sarana dan prasarana Pendidikan, pelatihan dan kemandirian masyarakat. Dalam bidang kesehatan, yaitu Kesehatan masyarakat di sekitar tambang, tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan. Dalam bidang pendapatan dan pekerjaan, yaitu perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan. Dalam bidang kemandirian ekonomi, yaitu peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya. Dalam bidang social dan budaya, yaitu bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan, bantuan bencana alam, dan partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan local setempat (Hadiyanti, 2008).

Pada akutualisasi pada masyarakat Kabupaten Muara Enim malah memperoleh kerugian yang cukup besar, terutama pada lingkungan yang berakibat pada kerusakan dan kehancuran pada lingkungan hidup. Selain eksploitasi secara besar-besaran pada alam juga terdapat kesenjangan sosial akibat adanya kegiatan pertambangan memberikan dampak cukup besar pada masyarakat Muara Enim. Kesenjangan dan eksploitasi alam ini tidak bersesuaian dengan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga perlu adanya tinjauan lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat kewajiban bagi perusahaan tambang untuk mengimplementasikan perbaikan kehidupana masyarakat di daerah pertambangan, terutama berupaya dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi, budaya pendidikan, jaminan kesehatan, dan bahkan pada perkembangan lingkungan yang lebih baik dan asri.

Perusahaan menilai bahwa telah memenuhi standar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara masyarakat menganggap pemberdayaan dan pengembangan masyarakat nilai belum dilaksanakan dengan baik sehingga Dinas ESDM Sumatera Selatan melaksanakan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan mengenai kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 untuk mencapai pemberdayaan maupun pengembangan usaha masyarakat, ditinjau belum mencapai dan mewujudkan tujuan utama PPM. Bagi pemilik usaha pertambangan mineral memiliki tugas dalam pelaksanaan dan konsultasi terkait program PPM ini, sementara masyarakat berperan dalam implementasi program dan sebagai target pelaksanaan program PPM saja. Masyarakat tidak memiliki keterlibatan dalam proses monev oleh pemerintah maupun perusahaan tambang, padahal untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan program ini dibutuhkan ruang bagi masyarakat agar berperan dalam pembuatan dan penyusunan hingga evaluasi program (Soetomo, 2006 : 125).

Hasil penelitian Brenada Sahat Pardamean (2017) bahwa berdasarkan analisa yuridis perkembangan usaha pertambangan wajib melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 belum mencapai dan mewujudkan tujuan utama PPM. pemilik usaha pertambangan sebagai fungsi eksekusi dan konsultasi sedangkan masyarakat berperan dalam eksekusi serta sebagai target pelaksana. Namun, disayangkan tidak terdapat keterlibatan masyarakat dalam monev yang diadakan pemerintah dan perusahaan untuk mencapai dan mewujudkan kebijakan PPM. seharusnya pada program ini masyarakat

diberikan ruang gerak untuk terlibat dalam pembuatan, penyusunan dan evaluasi sebab masyarakatlah yang menerima program itu sendiri.

Hasil penelitian Agnes Uthami (2016) dilakukan melalui pendampingan kelompok pengelola SAB serta monitoring dan evaluasi program. Pendampingan melalui pelatihan teknis yang didampingi oleh ahli teknis yang didampingi oleh ahli teknis kemudian juga dilakukan dengan memastikan pengelola SAB sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif dengan mengumpulkan pendapat dari warga sendiri.

Kemudian, hasil penelitian Viny Ratna Gumilang (2015) pelaksanaannya dinilai berhasil pada evaluasi proses, output kecuali akuntabilitas . evaluasi dampak menilai pelaksanaannya berperan signifikan dalam dampak yang ada tetapi kemandirian dalam pelaksanaan program belum diraih. Padahal faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan yaitu *leadership* dan media informasi. sementara itu , faktor penghambat adalah budaya bekerja sejak usia sekolah dan tidak adanya regenerasi kepengurusan pusat kegiatan belajar masyarakat. Atas dasar penelitian terdahulu ini, maka perlu adanya kajian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 1. Data perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim

1.	PT. Bukit Asam	9.	PT. Synfuel Indonesia
2.	PT. Manambang Muara Enim	10.	PT. Guna Bara Sarana
3.	PT. Musi Prima Coal	11.	PT. Lion Power Energi
4.	PT. Bara Anugerah Sejahtera	12.	PT. Inti Bumi Sukses
5.	PT. Cakra Bumi Energi	13.	PT. Sumber Mineral Perdana
6.	PT. Sriwijaya Bara Priharum	14.	PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng
7.	PT. Truba Bara Banyu Enim	15.	PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera
8.	PT. Pasifik Global Utama		

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumsel (2020)

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat perusahaan yang masih beroperasi di Kabupaten Muara Enim dimana perusahaan tersebut sudah melakukan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan yang ada untuk menjalankan PPM, tetapi dalam 15 perusahaan tersebut dapat dilihat angka persentase masyarakat dimana perusahaan yang memiliki angka persentase terendah itulah perusahaan yang akan di dilihat dan di bahas oleh penulis .

Tabel 2. Rincian Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada perusahaan Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

No.	Nama Perusahaan	Program PPM
1	PT. Manambang Muara Enim	a. Pendidikan : darmasiswa D3, S1, S2, dan S3. Mendukung kualitas pendidikan dengan perbaikan sarana dan prasana pendidikan. b. Kesehatan : progam PERGIZI (Upaya meningkatkan Kesehatan Gizi Ibu-Anak, kesehatan masyarakat melalui PM KPAD,dll. Program Bank Sampah. c. Tingkat Pendapatan rill atau pekerja : Ekspansi agrobisni; perluasan peternakan dan perikanan masyarakat.

		<p>d. Kemandirian ekonomi : Pengembangan produk lokal UKM; Case Study dampak tambang dan IPM</p> <p>e. Social dan budaya : Kegiatan perayaan keagamaan, preservasi kegiatan lingkungan, seni dan budaya peningkatan ekowisata Muara Enim.</p> <p>f. Partisipasi masyarakat: adanya aktivitas kebugaran; Pelestarian budidaya lingkungan dengan masyarakat; dsb</p> <p>g. Pembentukan Komunitas PPM : Ketersediaan sarana kegiatan; dsb</p> <p>h. Ekspansi infrastruktur PPM : infrastruktur kabupaten; infrastruktur perdesaan.</p>
2	PT. Musi Prima Coal	<p>a. Pendidikan : darmasiswa Utusan Daerah (BUD) ; Pengadaan angkutan pelajar.</p> <p>b. Kesehatan : Akses air bersih; Screening 150 mata & operasi katarak; Sekolah sehat (penyempurnaan fasilitas).</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Demplot pelaksanaan pupuk organik hayati; Pengembangan listrik Desa energi biogas; Pengembangan perikanan darat.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Awariness & pembinaan motivasi pembuatan BUMDes.</p> <p>e. Sosial & Budaya : Bantuan tempat ibadah (mesjid, musholla, gereja).</p> <p>f. Pemberian kesempatan pada warga setempat buat ikut berpartisipasi pada pengelolaan lingkungan.</p> <p>g. Pembentukan kelembagaan komunitas warga pada penunjang kemandirian PPM : Pelaksanaan pembinaan pengembangan UMKM dan pengembangan Lembaga Inkubator Bisnis.</p> <p>Pembangunan infrastruktur yg menunjang PPM : Pengembangan laboratorium SMK.</p>
3	PT. Bara Anugerah Sejahtera	<p>a. Pendidikan : Beasiswa S1 & S2; Pelatihan Guru.</p> <p>b. Kesehatan : Fasilitas air bersih; Tunjangan paramedic.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Pasar Desa;</p>

		<p>Keramba jaring apung.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Bantuan capital kerja UKM; Teknologi pemasaran pengembangan UKM Masyarakat Sekitar Tambang.</p> <p>e. Sosial & Budaya : Bantuan pembangunan Masjid, Musholla; Organisasi pemuda & event olahraga.</p> <p>f. Pemberian kesempatan pada warga setempat buat ikut berpartisipasi pada pengelolaan lingkungan.</p> <p>g. Pembentukan kelembagaan komunitas warga pada menunjang kemandirian PPM : Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro.</p> <p>Pembangunan infrastruktur yg menunjang PPM : Pembangunan jalan & jembatan.</p>
4	PT. Cakra Bumi Energi	<p>a. Pendidikan : Pemberian beasiswa perguruan tinggi; Transportasi sekolah.</p> <p>b. Kesehatan : Pelayanan kesehatan KAT; Perlengkapan pos gizi; Berau Dentistry Social Care.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Management kebun; Budidaya karet.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Pendampingan home industri & UMKM.</p> <p>e. Sosial & Budaya : Pembinaan mental keagamaan; Inisiasi BUMDes, karang taruna, dll; Pembinaan olahraga prestasi unggulan.</p> <p>f. Pemberian kesempatan pada warga setempat buat ikut berpartisipasi pada pengelolaan lingkungan : Sanitasi lingkungan jamban keluarga, wahana pengelolaan sampah, pencegahan penyakit endemik, dan pengelolaan Air Bersih.</p> <p>g. Pembentukan kelembagaan komunitas warga untuk menunjang kemandirian PPM : Tata kelola YDBBC; dsb</p> <p>Pembangunan infrastruktur yg menunjang PPM : Infrastruktur dasar (listrik, air, jalan, bisnis tani) sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, umum.</p>

5	PT. Sriwijaya Bara Priharum	<p>a. Pendidikan : Program perpustakaan keliling & Arutmin Bookcorner; Beasiswa bagi anak didik & mahasiswa dengan program BUD & beasiswa SD-SMA; Kegiatan magang & penelitian mahasiswa, dukungan dalam ajang lomba akademik.</p> <p>b. Kesehatan : Program posyandu, donor darah, senam massal, penyuluhan kesehatan, inspeksi kesehatan gratis; Pelatihan energi kesehatan, insentif tenaga kesehatan.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Pembinaan KUM perdagangan; Pembinaan & peningkatan kegiatan peternakan seperti Kambing dan sapi; Pengadaan bibit flora & penanaman areal reklamasi.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Monitoring & penilaian perkembangan unit bisnis binaan.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Pembangunan atau pemugaran tempat ibadah, pengajian, acara Idul Fitri, Ramadhan & Hari Besar Agama lainnya; Pembinaan seni budaya wilayah dan kearifan lokal setempat.</p> <p>f. Keikutsertaan warga dalam pengelolaan lingkungan : Penghijauan dan kampanye lingkungan.</p> <p>g. Pembentukan komunitas masyarakat mandiri PPM : Pengembangan kelembagaan komunitas warga guna menunjang ekonomi lokal terpadu, partisipasi dalam forum CSR.</p> <p>Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM : Perbaikan sarana/prasarana.</p>
6	PT Bukit Asam (PTBA)	<p>a. Pendidikan : Beasiswa “AYO SEKOLAH” SD-SMA; Edukasi kopi untuk Petani Kopi Desa Pelakat; Bantuan sarana belajar (Kursi, Meja, Komputer, dll).</p> <p>b. Kesehatan : Pemberian makanan tambahan pada Ibu Hamil & Balita; Bantuan peningkatan Kesehatan warga; Sarana Prasarana Kesehatan.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Bantuan sarana dan</p>

		<p>prasarana untuk mesin percetakan bagi bisnis Lingga Kreatif; Bantuan sarana</p> <p>prasarana untuk mengelola kopi Semendo Cap Bukit Asam; Melaksanakan program Hilirisasi produk pertanian (beras).</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Penyaluran dana kemitraan kepada Usaha Kecil & Koperasi, Pembinaan Usaha kepada Mitraan Binaan.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Pemberian sarana/prasarana kegiatan Ibadah; Bantuan elektrifikasi untuk masyarakat; Pengembangan Teknologi Pengairan Sawah.</p> <p>f. Partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan : Melaksanakan program lingkungan (bank sampah, ruang hijau); Melaksanakan penanaman bibit pohon.</p> <p>g. Pembentukan komunitas warga PPM : Program Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) seperti Sentra Industri Manufaktur, Agroindustri, Jasa Boga.</p> <p>Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM : Pembetonan/pegecoran jalan; Pembangunan sarana olahraga</p> <p>Pembangunan/perbaikan jembatan/bangunan.</p>
7	PT. Truba Bara Banyu Enim	<p>a. Pendidikan : Program 200 Pengajar Berprestasi; Gebyar OSN Pengajar & Siswa TK s.d. SMA.</p> <p>b. Kesehatan : Pemeriksaan kesehatan warga di 6 Desa; Pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat; Penataan sanitasi lingkungan.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Program pertanian melalui komoditi.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Pelatihan peningkatan kapasitas UKM.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Bazar Ramadhan; Bantuan aktivitas kemasyarakatan & bala alam; Pemilihan Putra Putri Madani.</p> <p>f. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan : Sarana</p>

		<p>Air Bersih.</p> <p>g. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM : Kerjasama pendampingan wisata dengan duta pariwisata daerah.</p> <p>Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM : Pembangunan ruang kelas.</p>
8	PT. Pasifik Global Utama	<p>a. Pendidikan : Training Pengajar & siswa Pengembangan sekolah hijau; Transportasi sekolah; Support pengembangan skill siswa & mahasiswa.</p> <p>b. Kesehatan : Kampanye kesehatan masyarakat; Pengembangan UKS.</p> <p>c. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan : Program ketahanan pangan Nasional; Peternakan yang terintegrasi; Bantuan benih ikan Kelompok Budidaya ikan lele.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Bantuan untuk kelompok Budidaya ikan lele.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Bantuan Safari Ramadhan dan Idul Fitri; Pameran lokal dan Nasional; Bantuan bencana alam banjir santan dan bontang.</p> <p>f. Partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan</p> <p>g. Pengembangan home industri melalui komunitas warga petani Perbaikan infrastruktur seperti halte sekolah, inventaris sekolah; jalan pertanian, irigasi persawahan, dan akses jalan petani ke kebun.</p>
9	PT. Synfuel Indonesia	<p>a. Pendidikan : Mengadakan beasiswa bagi pendidikan sarjana di 1 desa; mengembangkan pesantren, mengadakan pelatihan jurnalistik bagi pelajar & mahasiswa di hulu sungai selatan.</p> <p>b. Kesehatan : Khitanan massal; pemeliharaan sarana air bersih.</p> <p>c. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan : mengadakan</p>

		<p>bantuan pupuk untuk petani; Bantuan pengembangan ternak Ayam petelur; Biaya replikasi peternakan kambing.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Mengadakan gerobak pedagang kaki lima taman palidangan sehat; Bantuan mesin pengemasan untuk BUMDes 7 Desa.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Bantuan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu dalam rangka Idul Fitri 1439 H; Bantuan perahu karet untuk BPBD.</p> <p>f. Partisipasi aktif warga dalam mengelola lingkungan : Pembayaran Pupuk Bio Nature; Pengadaan bibit karet untuk restorasi kawasan.</p> <p>g. Upaya pembuatan komunitas warga PPM : Bantuan rutin beras untuk pusat kegiatan belajar Masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM : Biaya pembuatan pos pelayanan.</p>
10	PT. Guna Bara Sarana	<p>a. Pendidikan : Penyediaan transportasi untuk anak sekolah Desa Pangadan; Penyediaan gedung sekolah TK dan SD berupa hibah lahan dan bangunan; Insentif guru ngaji; dsb</p> <p>b. Kesehatan : Pengobatan massal.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Penerimaan karyawan langsung, karyawan yang diterima melalui perusahaan alih daya(outsource), memberikan bantuan pakan ikan lele.</p> <p>d. Sosial dan Budaya : Bantuan dalam rangka safari Ramadhan; Bantuan kursi Roda untuk tokoh masyarakat yang tidak mampu; Penyediaan bantuan generator untuk masyarakat.</p> <p>e. Partisipasi aktif warga dalam peduli lingkungan</p> <p>f. Perbaikan jalan di Desa area tambang,</p>
11	PT. Lion Power Energi	<p>a. Pendidikan : Beasiswa, bimbingan belajar, perbaikan gedung sekolah</p> <p>b. Kesehatan : Upaya perbaikan gizi buruk, fasilitas</p>

		<p>kesehatan gratis, tenaga honorer pemberian bantuan operasional seperti renovasi, perbaikan alat kesehatan dan sarana di Puskesmas.</p> <p>c. Pekerjaan : Pemberian bantuan bisnis petani seperti pupuk, pestisida & Perintisan usaha kelompok ternak ayam pedaging/petelur.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Dukungan kewirausahaan seperti sarana & prasarana usaha, kegiatan studi banding dalam usaha UMKM & BUMDes.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Meramaikan dan mendukung kegiatan keagamaan dan bantuan prasarana kegiatan.</p> <p>f. Melakukan kegiatan penanaman tanaman kayu di bantaran Sungai.</p> <p>g. Komunitas PPM : Pelatihan BUMDes; Kegiatan peningkatan usaha (poktan, pokyan, dll).</p> <p>h. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM : dukungan air bersih, perbaikan fasilitas jalan desa, & sarana wisata alam.</p>
12	PT. Inti Bumi Sukses	<p>a. Pendidikan : Program pelatihan Pengajar; Perbaikan fasilitas ruang laboratorium; Memperbaiki ruang kelas; Kegiatan latihan kepemudaan.</p> <p>b. Kesehatan : Pelayanan pengobatan gratis; Kampanye PHBS mencegah dan menanggulangi muntaber; Pembangunan fasilitas rumah sehat Mamput; Posyandu balita dan lansia.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Membina perternak itik, kambing, sapi, lele, nila dalam program pembinaan peternakan; Program pembinaan usaha getah.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Mengembangkan produk unggulan lokal (terbentuk kelompok SME); Mengembangkan peternakan perikanan (pada program ikan tawar).</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Merenovasi rumah ibadah; membina kegiatan kepemudaan & olahraga; membina sanggar seni budaya.</p>

		<p>f. Masyarakat ikut serta dalam mengelola lingkungan : menanam di wilayah reklamasi</p> <p>g. Membentuk komunitas PPM : Mengembangkan program Koperasi Pengembangan Bisnis.</p> <p>Membangun infrastruktur PPM : memperbaiki 10 Akses ruas jalan dan jembatan.</p>
13	PT. Sumber Mineral Perdana	<p>a. Pendidikan : mendampingi kegiatan OJT untuk 7 siswa/mahasiswa; Bantuan perlengkapan MCK.</p> <p>b. Kesehatan : program senam pagi dikawasan tambang; perbaikan fasilitas air bersih.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Program ketahanan pangan (pipanisasi irigasi sawah sepanjang 800 meter di Sungai); Program revolusi jagung seluas 20 Ha di Areal Pascatambang; Pemasangan siring (turap) saluran irigasi.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : mengembangkan kebun hortikultura dari Kelompok Wanita Tani (KWT), Partisipasi UKM Binaan PT MHU yaitu Kelompok UPPKS.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : berpartisipasi PT MHU dalam perayaan Isra Mi'raj.</p> <p>f. Membentuk komunitas PPM : Kontribusi PT. SMP dalam PPM melalui Forum CSR Pertambangan.</p> <p>g. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM : Pembangunan pendopo makam nasrani.</p>
14	PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng	<p>a. Pendidikan : Pendidikan bagi pengajar TK/TPA Amanah; fasilitas alat peraga edukasi; Program mengadakan fasilitas permainan outdoor bagi PAUD; Program mengadakan komputer.</p> <p>b. Kesehatan : Memastikan program kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pembinaan posyandu balita dan lansia; membangun bank sampah</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan :</p>

		<p>Mengembangkan program pertanian Karet, ayam kampung, dan fasilitas pertanian;</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Mengembangkan program UMKM; Membina kegiatan PKK.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : Program memperingati Hari Besar Keagamaan; Safari Ramadhan.</p> <p>f. Pembangunan komunitas PPM : Memanfaatkan lahan bebas milik PT WSL oleh Petani Binaan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, intage PDAM.</p> <p>g. Membentuk komunitas PPM : Forum komunikasi masyarakat Desa.</p> <p>Membangun infrastruktur PPM : Program renovasi WC BPU.</p>
15	PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera	<p>a. Pendidikan : Beasiswa sepak bola; pengadaan bantuan buku dan air bersih; Buku kurikulum sekolah.</p> <p>b. Kesehatan : Program Training kesehatan di area tambang; membuat sumur bor.</p> <p>c. Tingkat pendapatan rill atau pekerjaan : Pendanaan untuk perkebunan; Studi perbandingan pengembangan jagung, dan pampang.</p> <p>d. Kemandirian Ekonomi : Pengadaan mesin perontok jagung; Membuat sumur bor untuk petani desa.</p> <p>e. Sosial dan Budaya : membangun training center.</p> <p>f. Mengadakan partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan : pengadaan lingkungan, lomba HBS dan Jambore.</p> <p>g. Membangun komunitas PPM : Kegiatan forum PPM; Penambahan BBM.</p> <p>Membangun fasilitas PPM : Membuat pintu gerbang & taman.</p>

Sumber :Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (2020)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut terdapat 15 Perusahaan di Kabupaten Muara Enim. Data pada Tahun 2019, tercatat setiap perusahaan memiliki program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang dilaksanakan bervariasi mulai dari pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan program lainnya yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa apakah program-program tersebut telah menyentuh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya peninjauan kembali terkait program-program tersebut berdayaguna bagi masyarakat atau malah sebaliknya.

Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Dampak yang dimaksud adalah dampak baik berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, serta berdayaguna tingkat sumber daya manusia.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, dari gambaran latar belakang tersebut, Peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimanakah evaluasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari peneliti bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan menjadi referensi pembelajaran bagi para mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu atau instansi terkait dalam pemecahan masalah yang terkait dengan evaluasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2017, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi 2)*, Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Dye, Thomas R *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall. 2011.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kaufman, R., & Thomas, S. 1980. *Evaluation Without Fear*. New York: New Viewpoints.
- Keith, Davis, Jhon W. Newstrom, 1995. *Perilaku Dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 1985, *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 1999. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Kedua. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stufflebeam, Daniel L. 1971. *The CIPP Model For Evaluation*, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk. (eds), *Evaluation in Education and Human Service*, Boston: Kluwer Academic Publisher.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra. 1994. *Publik Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja

Grafindo. Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta :
Media Pressindo.

Tulisan Ilmiah

Agnes Utami. 2016. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Pengelolaan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat*.

Brenada Sahat Pardamean. 2017. *Penelitian Terdahulu. Analisis yuridis
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha
Pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya
Mineral nomor 41 tahun 2016*.

Viny Ratna Gumilang. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility
PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang di Desa Lampegan Kabupaten
Bandung*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara